

Palembang, 31 Januari 2023

Nomor : 018 /BPR-PLG/I/2023
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Palembang Tahun 2022 melalui Sistem Informasi Perbarindo (SIP).

Kepada Yth,
Ketua DPP PERBARINDO
Di_
Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut kami sampaikan Laporan antara lain:

1. Laporan Tata Kelola perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang tahun 2022. *(sebagaimana terlampir)*
2. Tanda Terima Pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian yang kami laporkan, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang 211



S. YAFRIL
Direktur Utama

Tembusan: Yth:

1. Dewan Komisaris
2. Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Palembang

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506349-2-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-602731-17012023094831

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bprpasar@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-17 09:48:31



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : JL R SOEKAMTO NO 2 C-D RT 042 RW 008 KEL 8 ILIR KEC ILIR
TIMUR III PALEMBANG

Nomor Telepon : 5630071

Penjelasan Umum : Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4 POJK.03 tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015 yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip prinsip yaitu Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Independensi dan Kewajaran. Manajemen PT BPR Palembang berkomitmen untuk melaksanakan prinsip prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Palembang tahun 2022 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24 SEOJK.03 tahun 2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SYAFRIL	Direktur Utama	<p>1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan</p> <p>2. menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan</p> <p>3. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri sendiri maupun bersama sama atau kepada orang atau badan lain</p> <p>4. mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji pensiun atau jaminan hari tua jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku</p> <p>5. mengangkat memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku</p> <p>6. membentuk fungsi Sekretaris Perseroan</p> <p>7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.</p> <p>8. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggungrenteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya</p> <p>9. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan tersebut Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur</p> <p>10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>11. Direksi wajib melaksanakan prinsip2 GCG dalam setiap kegiatan usaha di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>12. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit auditor eksternal hasil pengawasan ojk Bank Indonesia</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	SLAMET	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	<p>1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank</p> <p>2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi</p> <p>3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank</p> <p>4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku</p> <p>5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank</p> <p>6. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan</p> <p>7. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>8. Dalam melaksanakan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain</p> <p>8. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya meliputi Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank Laporan Kepatuhan dan Laporan khusus mengenai kebijakan dan atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan OJK Bank Indonesia dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan</p> <p>9. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris</p> <p>10. Melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku</p> <p>11. memastikan penerapan program APU PPT telah dilakukan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan OJK maupun ketentuan perundang undangan lainnya.</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

rekomendasi dewan komisaris telah ditindak lanjuti antara lain hasil pemeriksaan audit intern ditanda tangani Direktur Utama dan dibuat tindak lanjut temuan audit. Pengangkatan kembali pengurus telah dilaporkan kepada OJK. Bagian SDM telah menjadwalkan survailen Dewan Komisaris pada tahun 2021 serta menjaga kerahasiaan dalam pemberian data kepada pemegang saham. bpr tidak mencairkan kredit umum yang bermasalah dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah. untuk kredit PNS telah dilakukan upaya resceduling atau restrukturisasi untuk proses penyelamatan kredit. disalurkan kredit UKM MUSI dan direncanakan perluasan pangsa pasar yaitu produk kredit sertifikasi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs H A WAHID SYUKUR	Komisaris Utama	<p>1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenangnya secara independen</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>3. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.</p> <p>4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku</p> <p>5. Dewan Komisaris wajib</p> <p>a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.</p> <p>b. Memberika laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS</p> <p>6. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris</p> <p>7. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.</p> <p>8. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban tugas tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan serta peraturan perundang undangan yang berlaku</p> <p>9. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap BPR, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.</p> <p>10 Pada umumnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut</p> <p>a. Pengawasan Strategis</p> <p>b. Pengawasan Perusahaan .</p> <p>11. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Drs H SUMIRIN T TJINTO	Komisaris	<p>1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas tanggung jawab dan wewenangnya secara independen 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini. 4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku 5. Dewan Komisaris wajib a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS 6. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris 7. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya. 8. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban tugas tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan serta peraturan perundang undangan yang berlaku 9. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap BPR, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR. 10 Pada umumnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut a. Pengawasan Strategis b. Pengawasan Perusahaan . 11. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Mutasi dilingkungan kepegawaian dapat dilakukan untuk tujuan promosi,, penyegaran maupun demosi 2. Agar lebih cepat dan tegas untuk permasalahan Fraud dan dibuat berita acara 3. Siapkan perubahan RBB 30 Juni 2022, rups tahunan dan luarbiasa 4. Pelanggaran sop diberikan sanksi tegas 5. Bpr secara umum sehat,, tetapi npl akan tetap menjadi perhatian dan dijadwalkan khusus olh direksi untuk mengundang dewan komisaris pembahasan khusus penyelesaian NPL 6. Mengingatkan kepada semua karyawan tentang kerahasiaan Bank yaitu rahasia tabungan dan deposito. 7. kepada Direksi dan PE harus memberikan contoh yang baik. 8. kepada direksi agar hal yang penting, segera ditindaklanjuti terkait proses bpr palembang menjadi BUMD Pemerintah Kota Palembang. 9. Agar Pelaksanaan RBB Tetap berpedoman pada Rbb yang telah dibuat.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SYAFRIL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	SLAMET	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan anggota Direksi Pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SYAFRIL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	SLAMET	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Hubungan Keluarga anggota Direksi Pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs H A WAHID SYUKUR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Drs H SUMIRIN T TJINTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada hubungan keuangan anggota dewan komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs H A WAHID SYUKUR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Drs H SUMIRIN T TJINTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada hubungan keluarga anggota dewan komisaris pada bpr

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	407550000	2	163020000
2	Tunjangan	2	692550000	2	277020000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1100100000		440040000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji dan tunjangan ditetapkan pada rups

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	TIDAK ADA
2	Transportasi	Tidak ada	TIDAK ADA
3	Asuransi Kesehatan	BPJS DAN GENERALI	BPJS
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

HANYA ASURANSI UNTUK FASILITAS LAIN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,80	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,10	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,10	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,30	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji Direksi dan Dewan Komisaris tertuang Di RUPS dan Gaji karyawan di keputusan direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	06-04-2022	9	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022
2	18-07-2022	9	Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022
3	10-10-2022	9	Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022
4	07-12-2022	5	Tindak Lanjut Evaluasi BPKP tentang proses penyesuaian bpr palembang
5	12-12-2022	7	Persetujuan RBB Tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris tidak hanya membahas laporan kinerja tahun berjalan namun juga membahas masalah isu strategis evaluasi penetapan kebijakan dan evaluasi rencana bisnis serta hal hal yang dianggap perlu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Drs H A WAHID SYUKUR	5	0	100,00
2	Drs H SUMIRIN T TJINTO	5	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris baik komisaris utama maupun komisaris selalu menghadiri rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	2	1	2	4
Telah Diselesaikan		0		0		3		4
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terjadi fraud pada tahun 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat gugatan perdata yang dihadapi oleh PT BPR Palembang terkait dengan ex debitur PT BPR Palembang an Rukiyah, dimana pada tahun 2017 memiliki pinjaman modal kerja di PT BPR Palembang, bersama Alm suami nya an Ilham Santoso Nasution . Total Plafond kredit Rp. 3.800.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220124	Kegiatan Sosial	Kue Ultah Dewan komisaris	keluarga pengurus bpr palembang	215.000
2	20220131	Kegiatan Sosial	Gotong Royong 1	Masyarakat	150.000
3	20220211	Kegiatan Sosial	Gotong Royong 2	Masyarakat	625.000
4	20220207	Kegiatan Sosial	Gotong Royong 3	Masyarakat	475.000
5	20220207	Kegiatan Sosial	Kado Aqiqah anak Karyawan 1	keluarga karyawan	200.000
6	20220211	Kegiatan Sosial	besuk Direktur Utama Sakit	keluarga pengurus bpr palembang	610.400
7	20220222	Kegiatan Sosial	besuk karyawan 1	keluarga karyawan	210.000
8	20220330	Kegiatan Sosial	kue ultah Dirut	keluarga pengurus bpr palembang	510.000
9	20220414	Kegiatan Sosial	Sumbangan Sembako Kegiatan Ramadhan 1443 H	Masyarakat	200.000
10	20220425	Kegiatan Sosial	sumbangan Petugas angkutan Sampah	Petugas Sampah	158.000
11	20220512	Kegiatan Sosial	besuk karyawan 2	keluarga karyawan	200.000
12	20220608	Kegiatan Sosial	Kado Kelahiran anak karyawan	keluarga karyawan	215.000
13	20220704	Kegiatan Sosial	Sumbangan sedekah subuh	Masyarakat	1.035.000
14	20220714	Kegiatan Sosial	Kado Aqiqah anak Karyawan 2	keluarga karyawan	200.000
15	20220726	Kegiatan Sosial	Sumbangan sembako kegiatan sedekah subuh berjamaah	Masyarakat	212.000
16	20220810	Kegiatan Sosial	sumbangan duka cita orang tua karyawan	keluarga karyawan	250.000
17	20220818	Kegiatan Sosial	sumbangan kegiatan BIDAR Tradisional dan Perahu Hias	Masyarakat	2.000.000
18	20220831	Kegiatan Sosial	besuk karyawan 3	keluarga karyawan	41.500
19	20221011	Kegiatan Sosial	Besuk Istri Komut	keluarga karyawan	250.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Sumbangan sosial pada tahun 2022 dan tidak ada untuk kegiatan politik

Nama BPR	: PT BPR Palembang
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: JL R SOEKAMTO NO 2 C-D RT 042 RW 008 KEL 8 ILIR KEC ILIR TIMUR III PALEMBANG
Nomor Telepon	: 5630071
Modal Inti BPR	: 28.016.858.155,00
Total Aset BPR	: 85.519.435.132,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: BPR Palembang dengan modal inti kurang dari 50 M telah memiliki struktur organisasi secara lengkap dimana Dewan komisaris berjumlah dua orang yaitu Komisaris utama dan anggota komisaris serta direksi terdiri dari direktur utama dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. untuk menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab manajemen risiko kepatuhan dan audit internal telah ditunjuk masing masing pejabat eksekutif dan telah independen yaitu tidak ikut operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan menindaklanjuti temuan audit meskipun masih terdapat beberapa temuan yang tindaklanjut penyelesaiannya belum sesuai dengan target date. Selain itu untuk mendorong upaya pengembangan sumber daya yang ada Direksi terus melaksanakan training dan sosialisasi ketentuan secara berkelanjutan. BPR Palembang juga telah menerapkan transparansi kondisi keuangan sesuagan sesuai ketentuan . Pada tahun 2022 RBB telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK namun untuk penyelesaian kredit bermasalah belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan di RBB. Untuk penyelesaian kredit bermasalah tidak sesuai target penyebab utama masih adanya dampak covid 19 , debitur tidak kooperatif selain itu SDM yang masih belum kompeten Rencana penyelesaian kredit bermasalah yang belum selesai terus ditindaklanjuti dengan target tercantum pada RBB tahun 2023 dan peningkatan kompetensi SDM melalui Training. Untuk peningkatan pertumbuhan kredit pada tahun 2022 melakukan penambahan jenis produk kredit produktif yaitu kredit pertanian untuk memperluas pangsa pasar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,70	0,18	1,38	0.276	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan tercantum pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,70	0,20	1,57	0.236	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan tercantum pada pedoman dan tata tertib kerja Komisaris
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR Palembang Modal inti kurang dari 50 M sehingga belum dibentuk Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR Palembang telah memiliki spo benturan kepentingan dan pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,88	0,20	1,98	0.198	Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PE kepatuhan yang telah berfungsi independen
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,90	0,18	1,98	0.198	Telah ditunjuk PE yang menangani fungsi audit dan telah bertindak independen dan telah menjalankan fungsi audit intern secara memadai
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,40	0,20	1,60	0.040	pelaksanaan fungsi audit ekstern atau KAP pada tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan OJK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,74	0,10	1,68	0.168	telah ditunjuk PE yang menangani fungsi manajemen risiko dan telah terdapat sistem informasi manajemen yang memadai
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,10	2,80	0.210	pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi pelampauan BMPK dan bpr palembang telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0.131	RBB telah disusun sesuai dengan ketentuan ojk meskipun ada beberapa target pada RBB yang pada saat realisasi belum tercapai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,60	0,20	1,80	0.135	BPR palembang telah membuat laporan publikasi dan tahunan sesuai ketentuan ojk serta prinsip transparansi kondisi keuangan juga telah sesuai dengan ketentuan ojk maupun ketentuan perundang undangan lainnya
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Modal inti PT BPR Palembang kurang dari 50 M dimana sudah terpenuhi Direksi terdiri dari 2 orang yaitu Direktur Utama dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Direksi PT BPR Palembang telah bertempat tinggal dikota yang sama dengan kantor pusat yaitu Palembang
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh Direksi PT BPR Palembang tidak merangkap jabatan pada Bank perusahaan non Bank dan atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh Direksi PT BPR Palembang tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu proyek yang bersifat khusus
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit namun masih terdapat penyelesaian tindaklanjut temuan otoritas yang diselesaikan pada tahun 2022
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat terkini dan tepat waktu kepada dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat direksi berdasarkan musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan Bank
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan merencanakan training pada RBB dan telah direalisasikan pada tahun 2021
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah melaksanakan sesuai pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS pada tahun 2021
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis dibidang kepegawaian melalui sosialisasi meeting maupun pada saat briefing pagi
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai ketentuan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	pencapaian target kinerja PT BPR Palembang sampai dengan cut off desember 2022 belum mencapai target yang tertuang pada RBB namun upaya peningkatan pengetahuan terus didorong melalui training ataupun coaching serta melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui Tim Penyelesaian kredit bermasalah dan pihak ketiga yaitu pengacara ataupun bantuan hukum lainnya.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	penyampaian laporan penerapan tata kelola telah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Modal inti bpr Palembang kurang dari 50 M dimana sudah terpenuhi sesuai ketentuan yaitu paling sedikit 2 orang terdiri dari Komisaris utama dan komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah komisaris tidak melampaui jumlah direksi sesuai ketentuan dimana Direksi berjumlah 2 orang dan komisaris berjumlah 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat maupun diperpanjang melalui rups sesuai ketentuan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Dewan Komisaris PT BPR Palembang telah bertempat tinggal di kota yang sama dengan kantor pusat bpr Palembang yaitu di kota Palembang
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti bpr Palembang kurang dari 50 M dimana belum memiliki komisaris independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris pt bpr Palembang tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada bpr bprs dan atau bank umum, tetapi anggota komisaris merangkap jabatan sebagai Direktur Keuangan di PT SP2J
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan komisaris di pt bpr Palembang tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua baik sesama anggota komisaris ataupun dengan direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh komisaris pt bpr palembang bertindak independen sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi namun belum konsisten secara tertulis
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris telah melakukan tugas pengawasan baik mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bpr palembang kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit baik temuan internal maupun eksternal namun komisaris belum meminta direksi untuk menyampaikan dokumen hasil
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan sesuai ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris pt bpr palembang tidak memanfaatkan bpr untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lainnya yang merugikan Bank serta remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan melalui rups
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil Rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	PT BPR Palembang telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Anggota dewan komisaris anggota direksi dan PE tidak mengambil tindakan yang merugikan bank dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pada tahun 2022 belum terjadi transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	pada tahun 2022 belum terjadi transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Palembang

Posisi Laporan : 31 Desember 2022